

Judul : Transaksi judi online turun, kerja Komdigi diapresiasi
Tanggal : Minggu, 09 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Transaksi Judi Online Turun

Kerja Komdigi Diapresiasi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemdigi) mengklaim berhasil memblokir 2,4 juta situs dan konten judi online (judol) dalam periode 20 Oktober hingga 2 November 2025. Senayan mengapresiasi sinergitas Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat tersebut.

ANGGOTA Komisi I DPR Farah Puteri Nahla menilai, keberhasilan memblokir dalam jumlah besar dalam waktu singkat bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut menunjukkan keseriusan penuh dan peningkatan kapasitas teknis yang signifikan dalam eksekusi di lapangan.

"Ini bukti Komdigi kini memiliki sistem crawling dan mekanisme takedown yang jauh lebih responsif dan efektif memberantas judol," kata Farah dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025).

Dalam periode yang sama, Komdigi juga melaporkan 23.604 rekening yang terafiliasi dengan judol kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk segera ditangani dan dibekukan. Sinergi Komdigi dan PPATK jadi hal yang krusial.

"Kolaborasi ini sangat krusial. Komdigi tidak hanya memutus akses di hulu, tapi juga produktif memutus aliran dana di hilir. Ini langkah taktis yang sangat tepat," ucap legislator Fraksi

PAN itu.

Farah mengatakan, saat ini efektivitas kebijakan kolaboratif terlihat jelas. Berdasarkan data PPATK, dengan sinergi ini terdapat penurunan angka transaksi judol hingga 57 persen. Sedangkan penurunan nilai deposit pemain mencapai 45 persen pada 2025.

"Data berbicara. Ini indikator keberhasilan kuat dan membuktikan bahwa kebijakan yang diterapkan Pemerintah sudah tepat sasaran," ucap putri dari Astamaputra Kapri Komjen Pol. M. Fadil Iman itu.

Farah mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto telah menjadikan isu judol sebagai prioritas nasional yang harus diselesaikan. Pasalnya, isu ini bukan lagi sekadar masalah sosial-kriminal biasa, melainkan sebuah ancaman serius.

"Kami akan kawal upaya ini agar terjalin kerja sama yang erat dengan Indonesia untuk memberantas kejahatan lintas negara ini sampai ke akar-akarnya," tegasnya.



Farah Puteri

Anggota Komisi III DPR Abdullah turut menyampaikan apresiasinya terhadap penurunan angka transaksi judol di Indonesia. Penurunan itu menunjukkan bahwa langkah-langkah Pemerintah bersama aparat penegak hukum dalam memerangi praktik haram tersebut mulai membuahkan hasil.

Kendati demikian, perjuangan untuk memberantas judol belum berakhir. Semua pihak, mulai dari masyarakat hingga aparat penegak hukum, jangan sampai lengah. Pasalnya, judol merupakan kejahatan yang sangat serius, merusak moral, ekonomi, dan ketahanan sosial masyarakat.

Untuk itu, dia mendorong

Pemerintah terus meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Termasuk memperkuat pengawasan digital, serta mempersempit ruang gerak pelaku dan jaringan judol yang beroperasi lintas negara. Dengan begitu, Pemerintah bisa terus menekan angka transaksi judi online di Indonesia.

"Penegakan hukum harus konsisten, dan pendekatan edukatif kepada masyarakat juga perlu digencarkan agar tidak ada ruang bagi praktik ini untuk tumbuh kembali," tegas politikus PKB itu.

Abdullah juga mendorong kepolisian, Komdigi, serta lembaga terkait lainnya untuk memperkuat kerja sama dalam pemblokiran situs dan aplikasi judol, sekaligus menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Termasuk jaringan perbankan atau penyedia layanan pembayaran yang memfasilitasi transaksi ilegal tersebut.

"Jangan beri celah bagi pelaku judol. Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal masa depan generasi bangsa," tegasnya.

Sebelumnya PPATK mengungkapkan, total perputaran uang atau transaksi judol di Indonesia hingga Oktober 2025 mencapai Rp 155 triliun atau

56 persen dibandingkan nilai transaksi judol pada 2024 yang mencapai Rp 359 triliun. Selain itu, nilai deposit pemain judol di Indonesia juga berhasil ditekan. Jika sebelumnya mencapai Rp 51 triliun, kini nilainya menyusut menjadi Rp 24 triliun pada Oktober 2025.

"Artinya, hingga saat ini kami semua dengan kolaborasi yang sangat kuat, tentunya di bawah arahan Bapak Presiden, telah terjadi penurunan sampai 57 persen transaksi terkait dengan judol," terang Kepala PPATK Ivan Yustavandana.

Penurunan ini diklaim berhasil mengurangi potensi kerugian yang diperkirakan bisa melampaui Rp 1.000 triliun tanpa intervensi Pemerintah. Data PPATK juga menunjukkan penurunan jumlah pemain kategori berpenghasilan rendah atau sekitar Rp 5 juta, yakni sebesar 67,92 persen.

Ivan menambahkan, Pemerintah melalui PPATK dan Komdigi mengintensifkan kolaborasi dengan mitra internasional sebagai strategi penanganan lanjutan. Terlebih mengacu pada pernyataan Presiden dalam Forum APEC Economic Leaders Meeting (AELM), judi merupakan kejahatan terorganisir lintas negara. ■ PYB